Respon Revolusi Digital, Pemkab Pasuruan Terapkan Pelayanan Digital

Jumat, 2 Februari 2018

Pemerintah Kabupaten Pasuruan berkomitmen untuk memberikan pelayanan publik secara online. Mereka melakukan ini dengan menerapkan kebijakan TIK secara komprehensif dan meningkatkan infrastruktur jaringan. Tahun ini, Dinas Kominfo menyediakan 110 Mbps untuk bandwidth internasional dan 200 Mbps untuk bandwidth lokal, sehingga memungkinkan seluruh OPD untuk memberikan layanan online.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Pasuruan sedang mempersiapkan perijinan online untuk memudahkan investasi dan meningkatkan nilai investasi di Kabupaten Pasuruan. Mereka menargetkan untuk menerapkan perijinan online untuk SIUP, IUI, dan perijinan lainnya di triwulan ke-4 tahun 2018.

Pemerintah pusat telah menginstruksikan semua instansi pemerintahan di seluruh Indonesia untuk memberikan pelayanan publik berbasis digital mulai Maret 2018. Ini adalah respon terhadap revolusi digital dan kebutuhan masyarakat akan layanan digital. Transformasi digital diharapkan dapat mempermudah urusan layanan pemerintahan dan meningkatkan transparansi.

Presiden Jokowi telah menginstruksikan bahwa semua izin yang dikeluarkan oleh pemerintah harus dapat dilakukan secara online melalui satu pintu. Ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi pemerintah dan memudahkan masyarakat.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara dan Menteri Pelayanan Sosial dan Menteri Pembantu Perdana Menteri Bidang Transformasi Digital Australia, Michael Keenan MP, sepakat bahwa transformasi digital harus dilakukan dengan tepat untuk mempercepat dan mempermudah urusan pemerintahan. Mereka juga menekankan pentingnya belajar dari pengalaman negara lain, baik yang berhasil maupun yang gagal, untuk mencapai tujuan ini.

Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.